



**PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN
TERHADAP PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN DAERAH
DENGAN VARIABEL MODERATING KOMITMEN ORGANISASI,
AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
(STUDI EMPIRIS PADA ANGGOTA DPRD KOTA DAN KABUPATEN
BLITAR PERIODE TAHUN 2014-2019)**

SKRIPSI

Oleh

**Desy Dwi Permatasari
NIM. 110810301100**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATING KOMITMEN ORGANISASI, AKUNTABILITAS
PUBLIK, DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode
Tahun 2014-2019)**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

**Desy Dwi Permatasari
NIM. 110810301100**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Keagenan	8
2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah	8
2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah	9
2.1.4 Pengetahuan Tentang Anggaran.....	9
2.1.5 Komitmen Organisasi.....	11
2.1.6 Akuntabilitas Publik.....	12
2.1.7 Transparansi Kebijakan Publik.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu	15
2.3 Kerangka Konseptual	25
2.4 Pengembangan Hipotesis	26
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	32
3.1 Populasi dan Sampel	32
3.2 Jenis dan Sumber Data	32
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4 Definisi Operasional.....	33
3.5 Metode Analisis Data.....	37
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	37
3.6 Pengujian Instrumen Penelitian.....	37
3.6.1 Uji Validitas.....	37
3.6.2 Uji Reliabilitas	37

3.7 Uji Asumsi Klasik	38
3.7.1 Uji Normalitas	38
3.7.2 Uji Multikolinearitas.....	38
3.7.3 Uji Heteroskedastisitas.....	39
3.8 Pengujian Hipotesis	39
3.8.1 Uji Regresi Linear Berganda	39
3.8.2 Uji F.....	40
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi	40
3.8.4 Uji t.....	41
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Gambaran Umum	42
4.2 Analisis Data	43
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	43
4.2.2 Deskripsi Jawaban Responden	47
4.3 Hasil Pengujian Instrumen Penelitian	54
4.3.1 Uji Validitas.....	54
4.3.2 Uji Reliabilitas	58
4.4 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	58
4.4.1 Uji Normalitas	59
4.4.2 Uji Multikolinearitas.....	59
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	60
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis	60
4.5.1 Analisis Regresi Linear Berganda	61
4.5.2 Uji F.....	62
4.5.3 Uji Koefisien Determinasi	62
4.5.4 Uji t.....	63
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian.....	64
4.6.1 Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap	

Pengawasan Keuangan Daerah	64
4.6.2 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah	65
4.6.3 Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah	66
4.6.5 Pengaruh Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah	67
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Keterbatasan	70
5.3 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	26



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Statistik Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	43
Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden	44
Tabel 4.3 Usia Responden.....	44
Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden	45
Tabel 4.5 Keikutsertaan Tentang Pelatihan Keuangan Daerah.....	46
Tabel 4.6 Pengalaman Politik Responden.....	46
Tabel 4.7 Pengalaman Menjabat Sebagai Anggota DPR/DPRD	47
Tabel 4.8 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden	47
Tabel 4.9 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden (X_1)	48
Tabel 4.10 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden (X_2)	49
Tabel 4.11 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden (X_3)	50
Tabel 4.12 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden (X_4)	52
Tabel 4.13 Kategori Rata-Rata Jawaban Responden (Y).....	53
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Variabel X_1	55
Tabel 4.15 Hasil Uji Validitas Variabel X_2	55
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Variabel X_3	56
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Variabel X_4	56
Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Variabel Y	57
Tabel 4.19 Hasil Uji Reliabilitas	58
Tabel 4.20 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4.21 Hasil Uji Multikolinearitas.....	59
Tabel 4.22 Hasil Uji Heteroskedastisitas	60
Tabel 4.23 Hasil Perhitungan Regresi Linear Berganda	61
Tabel 4.24 Hasil Uji F.....	62
Tabel 4.25 Hasil Uji Koefisien Determinasi	62

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Kuesioner Penelitian.....	74
Lampiran 2. Rekap Hasil Kuesioner	83
Lampiran 3. Statistik Deskriptif Rata-Rata Jawaban Kuesioner.....	85
Lampiran 4. Distribusi Nilai r_{tabel} Sig. 5% dan 1%	88
Lampiran 5. Hasil Uji Validitas Variabel X_1	89
Lampiran 6. Hasil Uji Validitas Variabel X_2	90
Lampiran 7. Hasil Uji Validitas Variabel X_3	91
Lampiran 8. Hasil Uji Validitas Variabel X_4	92
Lampiran 9. Hasil Uji Validitas Variabel Y.....	93
Lampiran 10. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X_1	94
Lampiran 11. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X_2	95
Lampiran 12. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X_3	96
Lampiran 13. Hasil Uji Reliabilitas Variabel X_4	97
Lampiran 14. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y.....	98
Lampiran 15. Hasil Uji Normalitas	99
Lampiran 16. Hasil Uji Multikolinearitas	100
Lampiran 17. Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas	101
Lampiran 18. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda.....	103
Lampiran 19. Hasil Uji F, Uji Koefisien Determinasi dan Uji t	106

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah S.W.T. sebagai ungkapan syukur atas segala nikmat luar biasa yang telah diberikan selama ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Rahmad Dediharta dan Ibu Susilawati, terimakasih atas doa yang tiada putusnya, atas curahan kasih sayang yang tiada habisnya, serta semangat dan dukungan baik secara moral maupun material yang telah diberikan selama ini.
3. Kakak tersayang Amarta Dika Eka Prasetya, beserta istrinya, Wenny Susilo Rahmawati, atas curahan kasih sayang dan dukungan baik secara moral maupun material.
4. Ahmad Nuruz Zaman, seorang hebat yang selalu memberikan motivasi dan membantu selama proses penyusunan skripsi, yang senantiasa memberikan semangat, kritik, dan saran disaat saya mulai lemah, lelah, dan ingin menyerah.
5. Ladies, enam orang sahabat saya (Fina, Nora, Mentari, risyah, Yunia dan Rochmi) selama dibangku perkuliahan, yang selalu memberikan semangat untuk terus berjuang.
6. Marsalita Irine Prabandari dan Vabella Eka Rahmawati, dua orang adik kos saya, yang selalu memberikan semangat, doa serta dukungan.
7. Mila Aditya Zeni, sahabat seperjuangan dari Blitar yang selalu memberikan semangat, doa serta dukungan.
8. Seluruh teman-teman jurusan Akuntansi Universitas Jember angkatan tahun 2011 yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

MOTTO

”Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyiroh : 5)

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”

(HR. Muslim)

“Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.”

(Imam Syafi’i)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Dwi Permatasari

NIM : 110810301100

Jurusan : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019) adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2015

Yang Menyatakan,

Desy Dwi Permatasari
NIM. 110810301100

SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATING KOMITMEN ORGANISASI, AKUNTABILITAS PUBLIK,
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
(STUDI EMPIRIS PADA ANGGOTA DPRD KOTA DAN KABUPATEN
BLITAR PERIODE TAHUN 2014-2019)**

Oleh

DESY DWI PERMATASARI

110810301100

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Andriana, S.E., M.Sc.

Dosen Pembimbing II : Kartika, S.E., M.Sc., Ak.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019)

Nama Mahasiswa : Desy Dwi Permatasari

N I M : 110810301100

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 10 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II,

Andriana S.E., M.Sc.

NIP. 198209292010122002

Kartika S.E., M.Sc., Ak.

NIP. 19820207200812002

Ketua Program Studi

S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad., SE, MM, Ak.

NIP. 197107271995121001

JUDUL SKRIPSI

**PENGARUH PENGETAHUAN TENTANG ANGGARAN TERHADAP
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DENGAN VARIABEL
MODERATING KOMITMEN ORGANISASI, AKUNTABILITAS PUBLIK,
DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
(Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun
2014-2019)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Desy Dwi Permatasari
NIM : 110810301100
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal:

7 Desember 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Nur Hisamudin, S.E., MSA., Ak. (.....)
NIP. 197910142009121001

Sekretaris : Novi Wulandari W., S.E., M.Acc & Fin, Ak. (.....)
NIP. 198011272005012003

Anggota : Drs. Imam Mas'ud, MM., Ak. (.....)
NIP. 195911101989021001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Dekan

Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si.
NIP. 19630614 1990021001

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, akuntabilitas publik, dan transparansi kebijakan publik. Objek penelitian ini yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Blitar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar yang berjumlah 75 orang. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga dari total populasi, sebanyak 47 orang yang dijadikan sebagai responden untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada responden. Dan metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Terdapat beberapa hasil yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini yaitu hasil pengujian hipotesis pertama yaitu pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Hasil pengujian hipotesis keempat yaitu transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Kata Kunci : Pengetahuan Tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Transparansi Kebijakan Publik.

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of knowledge about the budget of the supervisory board of city and county finances are moderated by the organizational commitment, public accountability, and transparency of public policies. Object of this study are members of the Regional Representatives City and County Blitar. The population in this study were all members of Parliament City and County Blitar consisting of 75 people. Sampling using purposive sampling method, so that the total population of as many as 47 people who serve as respondents to answer the questions contained in the questionnaire. Data collection techniques in this study using questionnaires distributed directly to the respondent. And the method of data analysis used is multiple linear regression with SPSS.

There are some results that can be concluded in this study that the results of testing the first hypothesis, namely knowledge about the council budget affects the area of financial control. Results of testing the second hypothesis that organizational commitment affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area. The results of testing the third hypothesis that public accountability has no effect on the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area. The results of testing the fourth hypothesis that transparency of public policies affect the relationship of the budget to the board knowledge of financial control area.

Keyword : *Knowledge About The Budget Council, Regional Finance Controller, Organizational Commitment, Public Accountability, Public Prticipation, Transparency of Public Policies.*

RINGKASAN

Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019) ; Desy Dwi Permatasari, 110810301100; 2015; halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Sejak reformasi, pengelolaan keuangan daerah mendapat perhatian besar dari pemerintah karena adanya kebijakan baru yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan daerah-daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan daerahnya masing-masing (otonomi daerah). Menurut Ulum (2009:129), Pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Pengertian dari pengawasan keuangan negara tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi pengawasan keuangan daerah, hanya saja pengawasan keuangan daerah dilakukan pada keuangan daerah yang sedang dikelola. Pengawasan ini sangat penting peranannya dalam melakukan pekerjaan atau tugas pemerintahan, karena dengan adanya pengawasan, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Selain itu, pengawasan ini berguna untuk mengetahui apakah program yang telah dijalankan telah sesuai dengan rencana atau tidak. Dan pengawasan keuangan daerah ini dipercayakan kepada anggota DPRD. Dengan adanya tanggungjawab tersebut diharapkan anggota dewan memiliki pengetahuan lebih tentang anggaran, baik dalam penyusunannya, pengawasan dan penggunaannya. Oleh karena itu, aparat pemerintah yang berwenang dalam mengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang lebih tentang anggaran, agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan perundangan yang berlaku. Komitmen Organisasi dalam pengawasan keuangan daerah sangat dibutuhkan, karena dengan memiliki komitmen terhadap organisasi maka anggota dewan akan

menggunakan pengetahuannya untuk melakukan pengawasan keuangan daerah dengan maksimal. Peranan akuntabilitas dalam masyarakat juga penting untuk memberikan bukti atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dananya berasal dari masyarakat. Dengan adanya akuntabilitas ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai pengelolaan keuangan daerah harus dapat terpenuhi guna meningkatkan transparansi berbagai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap anggota dewan legislatif dalam melakukan pengawasan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik. Penelitian ini dilakukan pada anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar dengan jumlah anggota 75 orang. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sehingga dari total populasi, hanya 47 orang yang dijadikan sampel dari penelitian ini. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarikan secara langsung kepada responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama, pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Kedua, komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Ketiga, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Keempat, transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode 2014-2019)”** yang telah disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Phd., selaku Rektor Universitas Jember.
2. Dr. Moehammad Fathorrazi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Achmad Roziq, S.E., M.M., Ak., selaku Sekertaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
4. Ibu Andriana, S.E., M.Sc., dan Ibu Kartika, S.E., M.Sc., Ak., selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Jember yang turut membantu dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan sampai penyelesaian tugas akhir.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Rahmad Dediharta dan Ibu Susilawati, terimakasih atas doa dan dukungan baik secara moral maupun material.

8. Kakak tersayang Amarta Dika Eka Prasetya beserta istri, Wenny Susilo Rahmawati, terimakasih atas dukungan baik secara moral maupun material.
9. Ahmad Nuruz Zaman, terimakasih atas semangat dan dukungan yang selalu diberikan.
10. Sahabat-sahabat S1-Akuntansi 2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja sama dan bantuannya selama ini.
11. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca.

Jember, 23 November 2015

Desy Dwi Permatasari

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah mendapat perhatian besar dari berbagai pihak sejak terjadinya reformasi. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan baru dari pemerintah yang mereformasi berbagai hal termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 yang berkaitan dengan keuangan negara dan daerah (Halim, 2007:1). Yang kemudian kedua Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut yang menjadi awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ulum, 2009:130). Otonomi daerah ini menjadikan daerah-daerah otonom di Indonesia memiliki wewenang untuk dapat melakukan pengawasan terhadap keuangan daerahnya masing-masing.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Baswir dalam Ulum, 2009:129).

Menurut Ulum (2009:129), pengawasan keuangan negara adalah segala tindakan untuk menjamin agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan aturan-aturan yang telah digariskan. Definisi dari

pengawasan keuangan negara ini tidak jauh berbeda dengan definisi dari pengawasan keuangan daerah, hanya saja pengawasan keuangan daerah dilakukan pada keuangan daerah yang sedang dikelola.

Pengawasan keuangan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Pengawasan bukan tahap tersendiri dari anggaran tetapi pengawasan merupakan bagian terpenting dari pengurusan keuangan negara maupun daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika pengawasan keuangan dikaitkan dengan anggaran, maka pengawasan keuangan meliputi tahap penyusunan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pertanggungjawaban. Artinya, pengawasan keuangan sudah dimulai sejak proses penyusunan dan berakhir hingga proses pertanggungjawaban.

Pengawasan sangat penting peranannya dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, karena dengan adanya pengawasan, tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman pada rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Adanya pengawasan memiliki maksud mengetahui apakah pekerjaan yang dilakukan berjalan lancar atau tidak. Kemudian pengawasan juga memiliki fungsi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan pegawai, mencegah terjadinya kesalahan yang sama ataupun kesalahan yang baru, dan mengetahui apakah program yang dilakukan berjalan sesuai rencana atau tidak. Pengawasan keuangan daerah ini dipercayakan kepada DPRD sebagai lembaga legislatif.

Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi umum yaitu, fungsi legislatif (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran, fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik, maka kementerian maupun lembaga yang berwenang harus benar-benar dapat mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengawasi pengelolaan keuangan negara agar keuangan negara bisa diselamatkan. Oleh karena itu, aparat pemerintah yang berwenang dalam mengelola keuangan harus memiliki

pengetahuan yang lebih tentang anggaran, agar pengelolaan keuangan yang mereka lakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan kuat untuk menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Oleh sebab itu, penelitian ini akan membuktikan seberapa penting komitmen organisasi bagi anggota dewan.

Peranan akuntabilitas publik dalam masyarakat sangat dibutuhkan karena akuntabilitas publik akan memberikan bukti atas pertanggungjawaban anggota dewan terhadap penggunaan anggaran yang berasal dari dana masyarakat. Pertanggungjawaban inilah yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap anggota dewan. Sehingga penelitian ini ingin membuktikan seberapa besar pengawasan anggota dewan terhadap penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan rencana anggaran daerah juga sangatlah penting. Partisipasi masyarakat akan membantu anggota dewan legislatif untuk memberikan masukan penyusunan anggaran daerah. Pada kenyataannya, masyarakat sendirilah yang mengetahui akan kebutuhan yang harus dipenuhinya. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menyusun anggaran.

Transparansi merupakan hal hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai anggaran yang telah dilaksanakan oleh aparatur pemerintah. Transparansi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap

anggota dewan legislatif. Oleh sebab itu penelitian ini akan membuktikan seberapa penting transparansi bagi masyarakat.

Penelitian sejenis diantaranya telah dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Isma (2007) dan Pramita dan Andriyani (2010). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan. Untuk variabel transparansi kebijakan publik, hasil penelitian Isma (2007) menunjukkan hubungan positif signifikan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah sedangkan penelitian Sopanah dan Mardiasmo serta Pramita dan Andriyani menunjukkan sebaliknya, bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.

Sampel penelitian ini dilakukan pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Kabupaten Blitar, selaku pengawas keuangan daerah.

Kota Blitar memiliki keistimewaan APBD dibanding kota-kota yang lain di Jawa Timur. Dibawah kepemimpinan Bapak Muhammad Samanhudi Anwar yang terkenal dengan APBD pro rakyat telah membawa banyak perubahan positif bagi masyarakat di Kota Blitar. APBD pro rakyat adalah sebuah konsep anggaran yang didedikasikan murni untuk kebutuhan dan kepentingan rakyat terutama di bidang pendidikan yakni dengan pendidikan gratis. Pendidikan gratis tersebut mencakup uang sekolah, seragam, ongkos jahit seragam, sepatu, tas, buku, dan bus sekolah secara gratis. Pendidikan gratis ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan. Targetnya agar anak-anak dapat berpartisipasi dalam pendidikan dan mendapatkan proses belajar mengajar. Pemerintah Kota Blitar telah mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan capaian angka partisipasi pada pendidikan menengah. Hal ini berkaitan dengan kebijakan umum

yang telah diterapkan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar. Tujuan akhirnya adalah agar tercipta sumber daya manusia masyarakat Kota Blitar yang berkualitas. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun (Bagian Humas dan Protokol, 2014).

Dari total kekuatan APBD Kota Blitar tahun 2014 sebesar Rp. 746.312.423.156,91 hampir 38%-nya dialokasikan untuk bidang pendidikan. Alokasi dana untuk Pendidikan Kota Blitar mencapai Rp. 280.986.650.334,60 termasuk untuk belanja pegawai dan dapat terserap seluruhnya (Blitarkota.go.id).

Sedangkan Kabupaten Blitar, dibawah kepemimpinan Bapak Herry Noegroho, pelayanan publik dan perbaikan infrastruktur adalah dampak terbesar yang dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten Blitar.

Seperti yang telah diberitakan di media *online* Sindonews bahwa Anggaran Belanja pegawai di Kabupaten Blitar tahun 2014 mencapai Rp 1,1 triliun. Alokasi tersebut mutlak mengalahkan pos anggaran lainnya. Menurut keterangan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Palal Ali Santoso, mayoritas anggaran terserap untuk kebutuhan gaji dan honor pegawai. "Ini meliputi pegawai negeri dan honorer. Nominal ini lebih besar dari 2013 sebesar Rp 900 miliar," ujarnya kepada wartawan. Sementara, kekuatan anggaran di Kabupaten Blitar pada 2014 mencapai Rp1,6 triliun. Menurut Palal, tingginya anggaran belanja pegawai disebabkan Kabupaten Blitar sebagai daerah pelayanan. Anggaran yang tersedia lebih banyak terserap untuk peningkatan sumber daya manusia. "Di antaranya adalah sertifikasi guru yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Blitar," jelasnya. Sementara untuk belanja langsung atau belanja modal lebih banyak terfokus pada proyek fisik. Yakni pada 2014 dialokasikan sebesar Rp500 miliar. "Meski volume pekerjaan tetap, namun nilai pekerjaan fisik yang ada naik bila dibandingkan 2013 sebesar Rp496 miliar," pungkasnya. Menanggapi hal itu,

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Abdul Munib mengharapkan para pegawai bisa optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Sebab pada prinsipnya mereka adalah abdi masyarakat. Karenanya digaji tinggi untuk melayani masyarakat," ujarnya. (Sindonews.com)

Terselenggaranya program-program pemerintah yang tepat sasaran tidak terlepas dari peran DPRD di bidang pengawasan. DPRD juga berkewajiban untuk menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan/aspirasi masyarakat baik disampaikan secara langsung (individu/kelompok), maupun secara tertulis (melalui surat/media) mengenai permasalahan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian terdahulu, serta ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Isma (2007) dan Pramita dan Andriyani (2010), maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali penelitian dengan judul **“Pengaruh Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) Dengan Variabel Moderating Komitmen Organisasi, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris Pada Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar Periode Tahun 2014-2019).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
2. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?

3. Apakah akuntabilitas publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
4. Apakah partisipasi masyarakat mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?
5. Apakah transparansi kebijakan publik mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui, menguji, dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
2. Mengetahui, menguji, dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi dengan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
3. Mengetahui, menguji, dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas publik dengan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
4. Mengetahui, menguji, dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi masyarakat dengan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).
5. Mengetahui, menguji, dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh transparansi kebijakan publik dengan hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan anggota dewan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

2. Bagi anggota DPRD

Sebagai masukan bagi peran anggota DPRD yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan otonomi daerah menjadi lebih baik.

3. Bagi masyarakat luas

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat secara luas mengenai pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh gaya kepemimpinan, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai tambahan referensi yang dapat memotivasi membantu, dan sebagai acuan dalam melakukan penelitian baru agar lebih baik dan lebih sempurna.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal (Raharjo, 2007).

Hal tersebut diatas, apabila dianalogikan pada organisasi sektor publik hakekatnya adalah sama. Rakyat sebagai prinsipal mendelegasikan kewenangannya kepada eksekutif selaku agen didalam mengelola uang rakyat guna kepentingan publik, dan prinsipal dalam hal ini berhak untuk mengawasi kinerja agen dalam mengelola sumberdaya yang dititipkan. Namun, dalam perkembangannya, prinsipal tidak mungkin lagi mengawasi secara langsung kinerja agen, sehingga membutuhkan jasa pihak ketiga. Masyarakat kemudian mempercayakan pada DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.

2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang dimaksud dengan semua hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai peraturan yang diterapkan. Hak tersebut akan menaikkan

kekayaan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah. (Halim, 2012:147).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di lain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan azas otonomi (Halim, 2012:147)

2.1.3 Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa, “Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah suatu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Hal ini juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD provinsi/kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD provinsi/kabupaten/kota. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah.

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Baswir, 1995 dalam Ulum 2009: 129).

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Halim, 2012: 39).

Dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah yaitu untuk menjamin keamanan komponen keuangan daerah agar dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sebagai upaya penghematan, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.1.4 Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:1121), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan sesuatu hal (pelajaran). Sedangkan anggaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan yang tidak terbatas. Anggaran

dapat diatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi knerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial (Freeman, 2003 dalam Nordiawan, 2010:48).

Dalam menjalankan fungsi optimalisasi peran DPRD sangat dibutuhkan agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif. Optimalisasi eran ini sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya. Secara ringkas DPRD mempunyai fungsi sebagai partner Kepala Daerah dan sebagai pengawas. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, meminta keterangan, mengajukan pernyataan pendapat, dan mengadakan penyelidikan (Juliastuti, 2013).

Dapat dikatakan bahwa pengetahuan anggaran adalah pemahaman mengenai suatu rencana operasi keuangan yang terdiri dari estimasi pengeluaran dan penerimaan selama periode waktu tertentu. Pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan kompetensi (pengetahuan, kemampuan dan *skill*) anggota dewan dalam menyusun anggaran, mendeteksi serta mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan dan kebocoran.

2.1.5 Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi (*organizational commitment*), didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seseorang individu, sementara komitmen norganisasional yang tinggi berarti memihak organisasi yang merekrut individu tersebut. (Robbins, 2014:140).

Komitmen organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan

kuat untuk menjadi bagian dari organisasi kerja tersebut. Individu mengidentifikasi dirinya pada suatu organisasi tertentu tempat individu tersebut bekerja dan berharap untuk menjadi anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi kerja (Pramita dan Andriyani, 2010).

Dalam melakukan pengawasan keuangan yang dilakukan oleh anggota dewan ada hal yang lain yang perlu dilihat yaitu komitmen organisasi. Anggota dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik (Pramita dan Andriyani, 2010).

Komitmen organisasi yang ada pada anggota dewan secara psikologis dapat dicerminkan pada kinerja yang mereka lakukan sebagai wakil rakyat, karena pada dasarnya komitmen organisasi yang muncul bukan hanya kesetiaan organisasi tetapi merupakan suatu proses yang harus dijalankan untuk mengekspresikan diri terhadap organisasi dan prestasi kinerja yang tinggi untuk dicapai.

2.1.6 Akuntabilitas Publik

Pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010:385).

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2004:31).

Akuntabilitas terdiri dari dua macam, yaitu :

- a. Akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
- b. Pertanggungjawaban horisontal yang merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Nordiawan, 2010).

Halim (2012: 45) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

- a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, *responsive*, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan di luar yang ditetapkan, serta sumber-sumber inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan. Pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas proses juga

terkait dengan pemeriksaan terhadap proses tender untuk melaksanakan proyek-proyek publik.

c. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Peran utama akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan, handal, dan dapat dipercaya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntabilitas merupakan sifat umum dari hubungan otorisasi asimetrik misalnya yang diawasi dengan pengawasnya, agen dengan prinsipal, yang mewakili dengan yang diwakili. Akuntabilitas lebih bersifat eksternal sebagai tuntutan pertanggungjawaban dari masyarakat terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh para pejabat atau aparat.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.1.7 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam membuat keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan disetiap penyelenggaraan pemerintahan (Mardiasmo dalam Kuddy, 2012).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah, antara lain :

- a. Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan APBD
- b. Adanya masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD
- c. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD
- d. Pelibatan masyarakat dalam advokasi
- e. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara anggota DPRD dan Pemerintah Daerah berkaitan dengan rancangan APBD
- f. Adanya kritikan dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD
- g. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD (Rima, 2006 dalam Juliastuti, 2013)

2.1.8 Transparansi Kebijakan Publik

Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nordawan, 2010).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Mardiasmo, 2009).

Sedangkan menurut Kuddy (2012), transparansi merupakan penyampaian akses informasi menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat mengetahui secara terbuka.

Kebijakan adalah merupakan petunjuk, aturan, rambu-raambu, signal penting, prinsip yang harus dipegang, penggarisan kewenangan, batas-batas, aturan main internal dan berbagai hal yang mendasari pembuatan program/kegiatan maupun peraturan-peraturan untuk pelaksanaan kebijakan publik dibuat untuk menjadikan proses dan hasil manajemen publik menjadi lebih baik (Kuddy, 2012)

Menurut Mardiasmo (2009), pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, antara lain :

1. Hak untuk mengetahui (*right to know*)
 - a. mengetahui kebijakan pemerintah
 - b. mengetahui keputusan yang diambil pemerintah
 - c. mengetahui alasan dilakukannya kebijakan dan keputusan tertentu
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*)

Yakni meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik.
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah yang dimoderasi oleh partisipasi

masyarakat, akuntabilitas publik, komitmen organisasi, transparansi kebijakan publik sebelumnya pernah diteliti oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Isma (2007), Pramita dan Andriyani (2010), Kuddy (2012), Juliastuti (2013).

Sopanah dan Mardiasmo (2003) meneliti tentang pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pengawasan keuangan daerah (APBD), pengetahuan anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh anggota dewan se Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Selain itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan.

Isma (2007) meneliti dengan judul pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah (APBD) dengan menggunakan sampel anggota dewan komisi C DPRD Kota Bengkulu menyimpulkan bahwa semua variabel pemoderasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan.

Pramita dan Andriyani (2010) meneliti tentang determinasi hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan dewan pada keuangan daerah, komitmen organisasi, transparansi kebijakan publik, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan se Karesidenan Kedu yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang,

Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi, akuntabilitas publik, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah. Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

Kuddy (2012) meneliti akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik sebagai pemoderating hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 111 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Disamping itu, penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa interaksi antara partisipasi masyarakat dengan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Namun sebaliknya, baik interaksi antara akuntabilitas maupun transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Penelitian serupa dilakukan oleh Juliastuti (2013), yang meneliti tentang pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Variabel dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan panitia anggaran Kota Padang, Payakumbuh, Padang

Panjang, Bukittinggi, dan Sawahlunto. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.

Berikut merupakan tabel penelitian terdahulu :

No.	Judul dan Peneliti	Variabel	Sampel	Hasil
1.	Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah. Sopanah dan Mardiasmo (2003)	Independen : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dependen : Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah. Moderating : Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik.	Seluruh anggota dewan se - Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD yang dilakukan oleh dewan. Selain itu, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat

				berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD, sedangkan interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan.
2.	Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Isma Coryanata (2007)	Independen : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dependen : Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah Moderating : Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan	Anggota dewan komisi C DPRD Kota Bengkulu.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa semua variabel pemoderasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang

		Transparansi Kebijakan Publik.		anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan.
3.	Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD). Yulinda Devi Pramita dan Lilik Andriyani.	Independen : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran. Dependen : Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah. Moderating : Komitmen Organisasi, Transparansi Kebijakan Publik, Akuntabilitas Publik, dan Partisipasi Masyarakat	Anggota dewan se Karesidenan Kedu yang meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Kebumen.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan komitmen organisasi, akuntabilitas publik, dan

				<p>partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah.</p> <p>Interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).</p>
4.	Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik	Independen : Pengetahuan Dewan Tentang	Anggota dewan pada kantor Dewan Perwakilan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa

	<p>sebagai Pemoderating Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Kuddy Apriyanto La'ang (2012).</p>	<p>Anggaran Dependen : Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah. Moderating : Akuntabilitas, Transparansi Kebijakan Publik, dan Partisipasi Masyarakat.</p>	<p>Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua yang meliputi Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 111 orang.</p>	<p>variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Disamping itu, penelitian ini juga dapat membuktikan bahwa interaksi antara partisipasi masyarakat dengan pengetahuan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan APBD yang</p>
--	--	--	---	---

				dilakukan oleh dewan. Namun sebaliknya, baik interaksi antara akuntabilitas maupun transparansi kebijakan publik dengan pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).
5.	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Miranda Juliastuti	Independen : Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran. Dependen : Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah. Moderating :	Anggota dewan panitia anggaran Kota Padang, Payakumbuh, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Sawahlunto.	Hasil dari penelitian tersebut adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan

	(2013).	Akuntabilitas Publi, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik.	terhadap pengawasan keuangan daerah, akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah, partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah, dan transparansi
--	---------	--	--

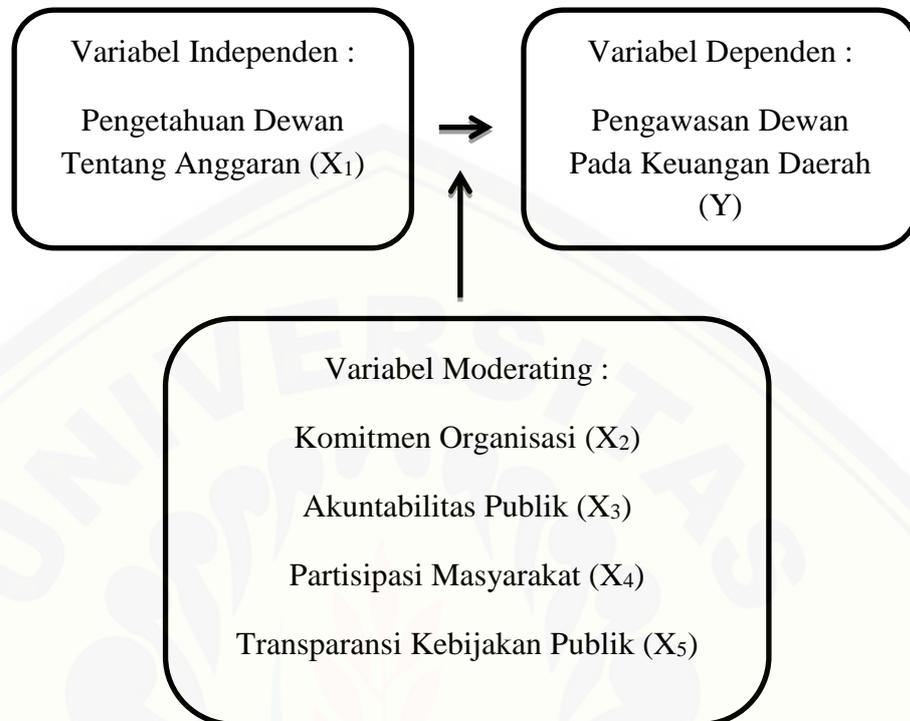
				kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah.
--	--	--	--	--

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Coryanata Isma (2007). Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel penelitian dan penambahan variabel. Jika penelitian terdahulu sampel yang diambil pada anggota DPRD Kota Bengkulu, sedangkan penelitian ini pada Anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar dan variabel yang ditambahkan variabel moderating yaitu Komitmen Organisasi.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka (landasan teori), dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel yaitu variabel dependen, variabel independen, dan variabel moderating. Gambar dibawah ini merupakan kerangka pikir penelitian yang memberikan deskripsi mengenai gambaran topik penelitian ini. Banyak prasangka negatif mengenai kapabilitas dan kinerja para wakil rakyat, namun yang ingin digali secara obyektif dalam penelitian ini adalah sejauh mana peran lembaga DPRD Kota dan Kabupaten Blitar dapat mengemban fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) sebagai dana publik.

Gambar 2.1



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Hubungan Pengetahuan Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. Ketiganya mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman, 1960 dalam Sopanah dan Wahyudi, 2010).

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menyusun berbagai peraturan daerah (Sopanah dan Wahyudi, 2010).

Pengawasan menurut Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 1 (6) menyebutkan bahwa, Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengetahuan sangat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah diantaranya pengetahuan tentang anggaran. Dengan memiliki pengetahuan yang lebih tentang anggaran, diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Anggota dewan akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif jika anggota dewan memiliki pengetahuan yang cukup dalam hal teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik, dan lain sebagainya.

Penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003), Isma (2007), Pramita dan Andriyani 2010, Kuddy (2012) dan Juliastuti (2013) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan teori, argumen, dan penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2.4.2 Hubungan Komitmen Organisasi dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah

Pada konteks pengawasan dewan terhadap keuangan daerah (APBD), dewan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, akan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik. Komitmen organisasi dapat merupakan alat bantu psikologis dalam menjalankan organisasinya untuk pencapaian kinerja yang diharapkan

(Nouri dan Parker, 1996; McClurg, 1999; Chong dan Chong, 2002; Wentzel, 2002 dalam Suhartono (2006)).

Komitmen organisasi yang dibangun oleh anggota dewan secara langsung mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan kinerjanya. Komitmen yang dibangun untuk menghasilkan kualitas kinerja yang baik, salah satunya dalam berkomitmen untuk melakukan pengawasan keuangan daerah. Secara psikologi komitmen anggota dewan dapat tercermin pada hal-hal apa saja yang dilakukan oleh anggota dewan selaku wakil rakyat. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dan demokrasi seperti sekarang ini sangat perlu dimiliki guna mengurangi pengaruh intervensi dari luar yang dapat mempengaruhi anggota dewan. Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah. Pada konteks kinerja dewan di DPRD, komitmen organisasi dalam era reformasi dan demokrasi seperti sekarang ini dalam sangat perlu dimiliki.

Penelitian yang dilakukan oleh Pramita dan Andriyani (2010) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan teori, argumen, dan penelitian terdahulu, maka peneliti dapat mengembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2.4.3 Hubungan Akuntabilitas Publik dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)

Teori keagenan (*Agency Theory*) merupakan konsep yang menjelaskan hubungan antara satu kelompok pemberi kerja (*principal*) dengan penerima tugas (*agent*). Teori keagenan ini dapat diterapkan dalam organisasi publik yaitu antara eksekutif dan legislatif (Suhartono, 2007).

Peran penting legislatif yaitu mewakili kepentingan masyarakat, pemberdayaan pemerintah dan mengawasi kinerja pemerintah. Dalam kepentingan masyarakat, legislatif dapat memberikan wewenang kepada agen untuk melakukan akuntabilitasnya kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Anggota dewan perlu memiliki pengetahuan lebih baik untuk dapat memahami akuntabilitas pemerintah agar dapat menjalankan fungsinya dalam mengawasi penyusunan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Penelitian Isma (2007) dan Andriyani (2010) menyatakan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Kuddy (2012) dan Juliastuti (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Berdasarkan teori, argumen, dan penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Akuntabilitas publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2.4.4 Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Perencanaan *bottom up* merupakan perencanaan yang dibuat berdasarkan kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama-

sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan atasan berperan aktif sebagai fasilitator.

Berdasarkan sudut pandang tersebut, perencanaan tidak hanya berhenti saat kebijakan sudah ditetapkan tetapi tetap berlangsung saat pelaksanaan yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan aspirasi kebutuhan dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat merupakan suatu partisipasi yang disampaikan melalui lembaga perwakilan.

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya yang dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif (Mardiasmo, 2009). Peran aktif masyarakat dalam advokasi anggaran akan menunjang pengetahuan dewan dalam menjalankan pengawasan APBD, terutama dalam hal mengontrol bahwa pelaksanaan APBD benar-benar telah sesuai dengan harapan masyarakat di lapangan (Darwis, 2008).

Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan peran masyarakat akan optimal dalam memberikan masukan atau ide-ide kepada pemerintah dalam menjalankan programnya. Tujuan-tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga masyarakat dapat melihat apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan. Partisipasi masyarakat ini merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah, karena dalam partisipasi masyarakat menangkut aspirasi dan pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Peran dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat yang diharapkan mampu meningkatkan pengawasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003), Pramita dan Andriyani (2010), dan Kuddy (2012) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan

dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Juliastuti (2013) menyatakan bahwa bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan keuangan daerah.

Berdasarkan teori, argumen, dan penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

2.4.5 Hubungan Transparansi Kebijakan Publik dengan Pengetahuan Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)

Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance* yang juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009).

Menurut Sopanah dan Mardiasmo (2003), anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparan jika memenuhi beberapa kriteri sebagai berikut :

- a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Keterbukaan informasi dalam pemerintahan merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance (transparency)*. Semakin transparan kebijakan publik dalam hal ini keuangan daerah, maka pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan akan

semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi keuangan daerah tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka asumsi yang dapat dirumuskan bahwa adanya transparansi kebijakan publik serta didukung oleh keterlibatan masyarakat akan sangat menunjang pengetahuan anggota dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan APBD, terutama dalam mengidentifikasi adanya pemborosan atau kegagalan didalam pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan pada anggaran tahun berjalan sesuai secara rinci sehingga pada akhirnya efektivitas pengawasan APBD yang dijalankan oleh DPRD dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, jika semakin tinggi penyelenggaraan kebijakan publik di daerah, maka semakin menunjang pengetahuan anggota dewan dalam mendeteksi terjadinya kebocoran/kegagalan anggaran, sehingga pada akhirnya pelaksanaan fungsi pengawasan anggaran daerah oleh DPRD akan menjadi semakin optimal.

Penelitian Isma (2007) menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh positif signifikan terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD. Sedangkan penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003), Pramita dan Andriyani (2010), Kuddy (2012), Juliastuti 2013 menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan APBD.

Berdasarkan teori, argumen, dan penelitian terdahulu, maka peneliti dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₅ : Transparansi Kebijakan Publik berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD).

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi yaitu sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2011:115).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota dan Kabupaten Blitar periode tahun 2014-2019 yang berjumlah 75 orang. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar periode tahun 2014-2019 yang tergabung dalam komisi II (bidang perekonomian dan pembangunan) serta Badan Anggaran, yang berjumlah 47 orang.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Sugiyono (2012:137), data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu jawaban kuesioner dari responden penelitian. Disamping itu, jenis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif yang berisi nilai berupa angka, kemudian diolah dan disusun kembali untuk analisa lebih lanjut.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, yaitu menggunakan survei langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner (angket). Operasional penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi secara langsung kepada responden di kantor DPRD Kota dan Kabupaten Blitar. Penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah yang dimoderasi oleh variabel komitmen organisasi, akuntabilitas publik, transparansi kebijakan publik, dan partisipasi masyarakat. Semua variabel dalam penelitian ini diukur berdasarkan teknik skala *likert*. Teknik skala *likert* menurut Sugiyono (2012:93), merupakan

metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Responden diminta untuk mengisi pertanyaan dengan kategori tertentu. Kategori skala ini menggunakan 5 angka skala skor, yaitu :

1. Skor 5 (SS=Sangat Setuju)
2. Skor 4 (S=Setuju)
3. Skor 3 (RR=Ragu-ragu)
4. Skor 2 (TS=Tidak Setuju)
5. Skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

3.4 Definisi Operasional

Penelitian ini menguji 6 variabel yang terdiri dari 1 variabel dependen, 1 variabel independen dan 4 variabel moderasi. Variabel dependen, yaitu pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD); variabel independen, yaitu pengetahuan dewan tentang anggaran; dan variabel moderasi, yaitu komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan publik.

3.4.2 Variabel Independen (X_1)

Variabel independen atau variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain (Indriantoro dan Supomo, 2011:163).

Pengetahuan dewan tentang anggaran (X_1) merupakan pemahaman anggota dewan dalam dewan dalam hal penyusunan anggaran. Pengetahuan dewan tentang anggaran diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Isma (2007) yang mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Pramita dan Andriyani (2010), dengan kategori : Skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Indikator dari kuesioner tersebut adalah :

- a. Pengetahuan mengenai penyusunan dan pelaksanaan APBD
- b. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi APBD
- c. Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mencegah terjadinya pemborosan atau kegagalan dalam pelaksanaan APBD
- d. Pengetahuan untuk melakukan pengawasan guna mengantisipasi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD.

3.4.3 Variabel Moderating

Variabel moderating yaitu tipe variabel-variabel yang memperkuat atau memperl lemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen (Indrianto dan Supomo, 2011:64).

Komitmen organisasi (X_2) merupakan sifat hubungan antara individu dengan organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-nilai tujuan organisasi kerja serta adanya kerelaan untuk menggunakan usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi. Komitmen organisasi diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Pramita dan Andriyani (2010), dengan kategori : Skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Indikator kuesioner tersebut adalah :

- a. Anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif
- b. Anggota dewan merasa masalah ada di legislatif sama seperti masalah sendiri
- c. Anggota dewan bersedia berusaha bekerja diatas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif
- d. Anggota dewan tetap bertahan pada legislatif karena komitmen dan loyalitasnya
- e. Anggota dewan bersikap profesional terhadap kinerja yang dilakukannya

Akuntabilitas publik (X_3) merupakan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk memberikan laporan yang tidak hanya bersifat pertanggungjawaban vertikal tetapi juga pertanggung jawaban horisontal. Akuntabilitas publik diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Isma (2007) dan Pramita dan Andriyani (2010), dengan kategori : Skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Indikator dari kuesioner tersebut adalah :

- a. Anggota dewan mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP
- b. Anggota dewan menggunakan LAKIP sebagai media untuk mengetahui, menilai keberhasilan dan kegagalan tugas
- c. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dapat dirasakan oleh masyarakat
- d. Prinsip penyusunan LAKIP jujur, objektif, dan transparan
- e. Penyampaian LAKIP dilakukan secara tertulis dan mekanisme penyampaian pelaporan LAKIP melibatkan pihak yang berwenang
- f. LAKIP meliputi pengungkapan mandat.

Partisipasi masyarakat (X_4) merupakan persepsi responden tentang keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh DPRD. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendapatkan data atau informasi sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran. Partisipasi masyarakat diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Isma (2007) yang mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Pramita dan Andriyani (2010), dengan kategori : Skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Indikator kuesioner tersebut adalah :

- a. Pelibatan masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD
- b. Masukan dan kritik dari masyarakat terhadap prioritas dan rencana APBD
- c. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD
- d. Pelibatan masyarakat dalam advokasi APBD
- e. Pelibatan masyarakat dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD
- f. Kritik dan saran masyarakat sebagai salah satu masukan dalam melakukan revisi APBD dan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.

Transparansi kebijakan publik (X_5) merupakan adanya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi anggaran agar mudah diakses oleh masyarakat. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Isma (2007) yang mengacu pada penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) dan Pramita dan Andriyani (2010), dengan kategori : Skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Indikator penelitian tersebut adalah :

- a. Pengumuman atau pemberian informasi oleh pemerintah daerah berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusun
- b. Kemudahan dokumen-dokumen kebijakan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah untuk diketahui publik
- c. Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
- d. Kemampuan transparansi anggaran dalam meningkatkan dan mengakomodasi usulan masyarakat serta adanya sistem penyampaian informasi anggaran kepada publik.

3.4.1 Variabel Dependen (Y) : Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD)

Variabel dependen atau variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro, 2011:63)

Pengawasan keuangan daerah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan yang meliputi pengawasan pada tahap penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (APBD) yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota dan Kabupaten Blitar. Pengawasan keuangan daerah diukur dengan menggunakan skala likert 5 poin dan kuesioner yang digunakan diadopsi dari penelitian Isma (2007) dan Pramita dan Andriyani (2010) dengan kategori : Skor 5 (SS=Sangat Setuju), 4 (S=Setuju), 3 (RR=Ragu-ragu), 2 (TS=Tidak Setuju), 1 (STS=Sangat Tidak Setuju).

Indikator dari pertanyaan tersebut adalah :

- a. Keterlibatan dewan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD
- b. Pelaksanaan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD
- c. Keterlibatan dewan dalam pengesahan APBD
- d. Kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun
- e. Keterlibatan dewan dalam memantau pelaksanaan APBD dan evaluasi yang dilakukan dewan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
- f. Evaluasi yang dilakukan dewan terhadap faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD
- g. Permintaan pertanggungjawaban (LPJ) APBD yang disampaikan Bupati/Walikota dan tindak lanjut dari dewan jika terjadi kejanggalan dalam LKPJ APBD

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Sunnyoto,

2013:35). Tabulasi menyajikan ringkasan, penyusunan data dalam bentuk tabel numerik maupun grafik. Statistik deskriptif digunakan peneliti untuk memberikan informasi dan karakteristik responden.

3.6 Pengujian Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau *valid* tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan *valid* jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Sunyoto, 2013:35). Suatu instrumen penelitian yang *valid* mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang *valid* berarti memiliki validitas yang rendah. Validitas *item* yang digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu *item* dalam mengukur apa yang ingin diukur. *Item* yang *valid* ditunjukkan dengan adanya korelasi antara *item* terhadap skor total *item*.

Untuk penentuan apakah suatu *item* layak digunakan atau tidak, caranya dengan melakukan perbandingan antara koefisien r_{hitung} dengan koefisien r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka *item* dinyatakan *valid* atau layak digunakan, sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka *item* dinyatakan tidak *valid* (Sunyoto, 2013:35).

3.6.2 Uji Reliabilitas

Suatu alat pengukur dikatakan reliabel apabila alat tersebut dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap suatu pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah *Cronbach's Alpha*. Menurut Uma Sekaran, pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas sebagai berikut (Priyatno 2013:30)

- a. *Cronbach's alpha* $< 0,6$ = reliabilitas buruk
- b. *Cronbach's alpha* $0,6-0,79$ = reliabilitas diterima
- c. *Cronbach's alpha* $0,8$ = reliabilitas baik

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah persamaan analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini terbebas dari penyimpangan asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas (Ghozali, 2011:110). Atau dapat dikatakan bahwa uji asumsi klasik merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji regresi linear berganda.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data residual terdistribusi secara normal. Residual merupakan nilai sisa atau selisih antara variabel dependen (Y) dengan variabel dependen nilai hasil analisis regresi (Y'). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data residual yang terdistribusi secara normal. Dua cara yang sering digunakan untuk menguji normalitas residual, yaitu dengan analisis grafik (normal P-P plot) regresi dan uji one *Kolmogorov-Smirnov Test* (Ghozali, 2011:160).

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas atau korelasi tinggi antarvariabel independen dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2011:105).

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Glejser. Jika tingkat kepercayaan signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:105-109).

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi adalah sebuah metode analisis data dalam statistika yang berkenaan dengan pencarian persamaan atau model. Tujuan dari uji linear berganda ini adalah untuk meramal (*predict*) rata-rata pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sugiyono, 2012:277). Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS (*Statistical Product and Service Solution*), dengan persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 X_2 + \beta_3 X_1 X_3 + \beta_4 X_1 X_5 + e$$

Dimana :

Y = Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)

α = Konstanta

X₁ = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (APBD)

X₂ = Komitmen Organisasi

X₃ = Akuntabilitas Publik

X₄ = Partisipasi Masyarakat

X_5 = Transparansi Kebijakan Publik

X_1X_2 = Hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Komitmen Organisasi

X_1X_3 = Hubungan antara Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Akuntabilitas Publik

X_1X_4 = Hubungan antara Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat

X_1X_5 = Hubungan antara Pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Transparansi Kebijakan Publik

$\beta_{1,2,3,\dots,8}$ = Koefisien regresi

e = Standar error

Adapun dari hipotesis yang diterima apabila angka signifikan < 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan jika angka > 0.05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

3.8.2 Uji F

Uji F merupakan uji kelayakan model yang harus dilakukan dalam analisis regresi linier. Uji F dapat digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan signifikan atau tidak, dengan ketentuan bahwa jika p value $< (\alpha) 0.05$ berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis, dengan tingkat kepercayaan 95%. (Ghozali, 2011:84).

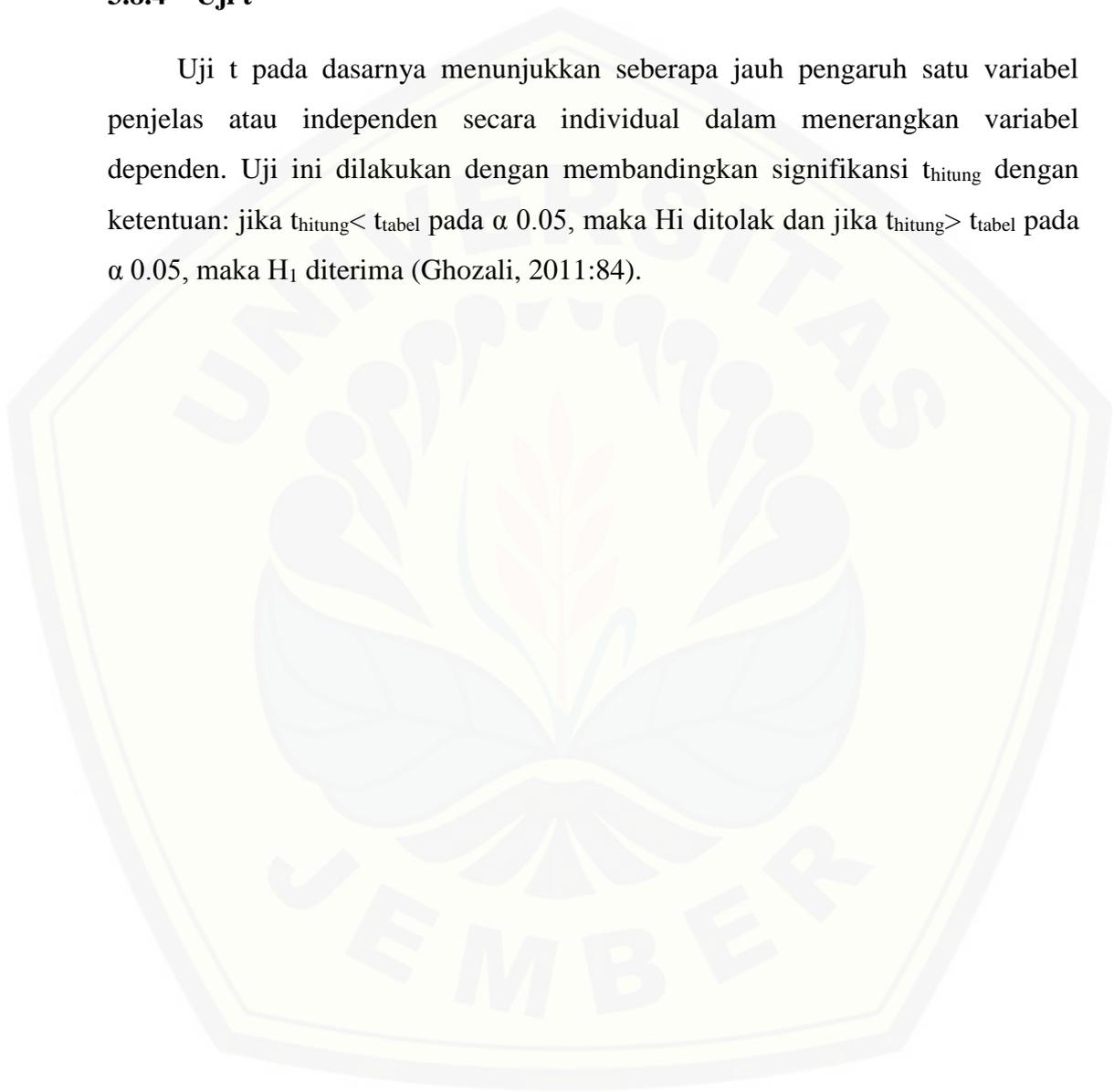
3.8.3 Uji Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R^2) ini mencerminkan seberapa besar varians dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel independen X . Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X . Dengan kata lain bila $R^2 = 1$, maka

semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R^2 nya yang mempunyai nilai antara nol dan satu (Ghozali, 2011: 169).

3.8.4 Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan signifikansi t_{hitung} dengan ketentuan: jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_0 ditolak dan jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha 0.05$, maka H_1 diterima (Ghozali, 2011:84).



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diungkapkan pada pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam pokok penelitian ini, yaitu :

1. Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap keuangan daerah. Anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan daerah harus memiliki pengetahuan tentang anggaran untuk dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran yang terjadi.
2. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Dengan memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka anggota dewan akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan pengawasan terhadap anggaran menjadi relatif lebih tepat dan baik.
3. Akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) hanya mampu dibaca dan dipahami oleh masyarakat tertentu.
4. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Peran masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat bermanfaat karena dengan adanya partisipasi masyarakat, maka akan mempermudah penetapan kebijakan baru dan pengawasan dewan pada pemerintah khususnya tentang keuangan daerah (APBD) akan semakin meningkat.

5. Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Akses terhadap transparansi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengaksesnya.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat dijadikan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Berikut keterbatasan dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya terbatas pada DPRD Kota dan Kabupaten Blitar, sehingga belum terlihat secara menyeluruh aspek pengawasan keuangan daerah.
2. Penelitian ini merupakan metode purposive sampling dengan menggunakan instrumen kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan.

5.3 Saran

Dari hasil penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya sampel diperluas menjadi seluruh Karesidenan Kediri.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengumpulkan data yang dilengkapi dengan menggunakan wawancara atau pertanyaan lisan agar data yang diperoleh lebih terinci dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Humas dan Protokol. 2014. *Pintar Tak Harus Bayar (Membedah Kinerja Walikota Blitar dalam menerapkan APBD PRO RAKYAT dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa)*. Blitar : CV. Mandiri Jaya.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Darwis, Herman. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran Terhadap Kinerja Anggota DPRD dalam Pengawasan APBD Dengan Partisipasi Masyarakat dan Budaya Organisasi sebagai pemoderasi*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Cetakan V*. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [Http://ekbis.sindonews.com/read/817565/33/belanja-pegawai-kabupaten-blitar-capai-rp1-1-t-1387196701](http://ekbis.sindonews.com/read/817565/33/belanja-pegawai-kabupaten-blitar-capai-rp1-1-t-1387196701) (diakses 2 April 2015)
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Yogyakarta : BPFE, Yogyakarta.

- Juliastuti, Ayu. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Keputusan Presiden Nomor 74 Pasal 1 (6). 2001. *Tata cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Kuddy, Apriyanto La'ang. 2012. *Gaya Kepemimpinan, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*. Tesis. Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Nordiwawan, Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Pramita, D. Y., dan Andriyani, L. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Muhammadiyah Magelang. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Priyatno, D. 2013. *Mandiri belajar analisis data dengan SPSS*. Jakarta: PT Buku Seru
- Raharjo, E. 2007. *Teori Agensi Dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi*. (Online), Vol. 2 No.1. (<http://penafokus.ac.id>, diakses 10 April 2015).

- Robbins, S. P, dan Timothy A. J. 2014. *Perilaku Organisasi, Organizational Behaviour Buku Terjemahan Edisi 16*. Jakarta : Gramedia
- Rosseptalia, Rima. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Sekretariat DPRD Kota Blitar. 2014. *Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Blitar Masa Jabatan 2014-2019*. Blitar.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Sopannah dan Wahyudi, I. 2010. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan Tentang anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Universitas Widya Gama Malang Corruption Watch (MCW).
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, Ehrmann dan Solichin, Mochammad. 2006. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.

Sunyoto, D. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ulum, Ilhyaul. 2009. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

[Www.Blitarkab.go.id](http://www.Blitarkab.go.id) (diakses tanggal 10 April 2015).

www.Blitarkota.go.id (diakses tanggal 10 April 2015).



Lampiran 1**KUESIONER PENELITIAN**

**PENGARUH HUBUNGAN PENGETAHUAN DEWAN TENTANG
ANGGARAN TERHADAP PENGAWASAN DEWAN PADA KEUANGAN
DAERAH DENGAN VARIABEL MODERATING KOMITMEN
ORGANISASI, AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI
MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK
(STUDI EMPIRIS PADA DPRD KOTA DAN KABUPATEN BLITAR
PERIODE TAHUN 2014-2019)**

Kepada Yth. Responden

Di-

Tempat

Dengan ini, saya sebagai peneliti :

Nama : Desy Dwi Permatasari

NIM : 110810301100

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Instansi : Universitas Jember

Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi daftar pertanyaan pada lembar berikutnya. Tidak ada jawaban benar atau salah dalam pengisian daftar pertanyaan ini sehingga peneliti berharap Bapak/Ibu mengisi kuesioner ini dengan jujur apa adanya.

Informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam daftar pertanyaan ini kami perlukan sebagai bahan penelitian dalam menyusun skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan Studi S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Peneliti menjamin kerahasiaan semua data di dalam daftar pertanyaan ini.

Atas kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Desy Dwi Permatasari

PETUNJUK PENGISIAN DAN PENGIRIMAN KUESIONER**A. Cara Pengisian Kuesioner adalah :**

1. Semua pertanyaan dijawab dengan cara **memberikan tanda silang (X) atau tanda centang (√)** pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i.
2. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena saya hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Saudara/i.
3. Saya sangat mengharapkan pengembalian kuesioner ini **paling lambat** dalam jangka waktu **satu (1) minggu** sejak Bapak/Ibu/Saudara/i menerimanya.
4. Terimakasih sebelumnya atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i meluangkan waktu untuk berpartisipasi melengkapi kuesioner ini.

B. Keterangan :

STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)

TS : Tidak Setuju (Skor 2)

TT : Tidak Tahu (Skor 3)

S : Setuju (Skor 4)

SS : Sangat Setuju (Skor 5)

A. BAGIAN PERTAMA

PETUNJUK : Bagian ini menanyakan tentang identitas Bapak/Ibu/Saudara/i serta pengalaman Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai anggota dewan.

1. Jenis Kelamin :
 - a. Laki-laki
 - b. Perempuan
2. Usia :
 - a. ≤ 30 tahun

- b. 31 – 40 tahun
- c. 41 – 50 tahun
- d. > 50 tahun

3. Pendidikan Terakhir :

- a. SMA
- b. SMK
- c. D1/D2/D3
- d. S1
- e. S2
- f. S3

Sebutkan bidang pendidikan :.....

4. Keikutsertaan dalam pendidikan pelatihan tentang keuangan daerah :

- a. Belum pernah
- b. 1 kali
- c. 2 – 3 kali
- d. 4 kali atau lebih

5. Pengalaman politik :

- a. < 2 tahun
- b. 2 – 5 tahun
- c. > 5 tahun

6. Pengalaman sebagai anggota DPR/DPRD :

- a. < 2 tahun
- b. 2 – 5 tahun
- c. > 5 tahun

B. BAGIAN KEDUA

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai hal-hal terkait **pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i tentang anggaran** yang disusun oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah dan SKPD. Pengetahuan dewan tentang anggaran dimaksudkan untuk menjalankan fungsi dewan dalam mengawasi keuangan daerah.

No.	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anggaran publik mendapatkan otorisasi legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.					
2.	Estimasi anggaran tidak memasukkan cadangan dana yang tersembunyi.					
3.	Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggungjawaban DPRD.					
4.	Pertanggungjawaban perhitungan APBD untuk Pemda Tingkat I ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri.					
5.	Dalam penyusunan APBD, Pemda dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara.					
6.	Anda sebagai anggota dewan perlu untuk memiliki pengetahuan mengenai penyusunan APBD.					
7.	Anda sebagai anggota dewan perlu memiliki pengetahuan untuk					

	mendeteksi terjadinya kebocoran.					
--	----------------------------------	--	--	--	--	--

C. BAGIAN KETIGA

PETUNJUK : Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan perasaan Bapak/Ibu/Saudara/i tentang berbagai hal terkait **komitmen dan loyalitas terhadap lembaga legislatif** dan khususnya pada komisi yang Bapak/Ibu/Saudara/i bidangi.

No.	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anda sebagai anggota dewan merasa terikat secara emosional dengan badan legislatif tempat Anda bekerja.					
2.	Badan legislatif di tempat Anda bekerja sebagai anggota dewan sangat berarti bagi anda.					
3.	Anda sebagai anggota dewan merasa masalah di dalam badan legislatif tempat anda bekerja juga seperti masalah Anda.					
4.	Anda sebagai anggota dewan mau bersaha diatas batas normal untuk mensukseskan kinerja badan legislatif di tempat Anda bekerja.					
5.	Anda sebagai anggota dewan saat ini masih tetap bertahan dalam badan legislatif tempat Anda bekerja karena komitmen dan loyalitas Anda sebagai anggota dewan terhadap badan legislatif.					
6.	Anda sebagai anggota dewan akan					

	bersikap profesional terhadap kinerja yang Anda lakukan.					
--	--	--	--	--	--	--

D. BAGIAN KEEMPAT

PETUNJUK : Pernyataan-pernyataan berikut ini berkaitan dengan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i selaku anggota dewan legislatif tentang **akuntabilitas** yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu pemerintah daerah dan SKPD.

No.	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anggota dewan perlu mengetahui standar operasional prosedur akuntabilitas penyusunan LAKIP yang disusun pemerintah daerah dan SKPD.					
2.	Anggota dewan menggunakan LAKIP sebagai media untuk mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas serta tanggungjawab instansi terkait pelaksanaan keuangan daerah (APBD).					
3.	Akuntabilitas merupakan pelaporan pertanggungjawaban masalah keuangan, hasil, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.					
4.	Anggota dewan mengetahui prinsip penyusunan LAKIP harus jujur, objektif dan transparan serta memiliki prinsip					

	pertanggungjawaban, prinsip prioritas dan prinsip manfaat.					
5.	Anggota dewan perlu mengetahui bahwa penyampaian LAKIP dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.					
6.	Anggota dewan perlu mengetahui mekanisme penyampaian pelaporan LAKIP melibatkan pihak yang berwenang membuat, menerima serta pengguna LAKIP.					
7.	LAKIP meliputi pengungkapan mandat apa yang diemban instansi, perencanaan strategis, perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja instansi, serta analisis akuntabilitas kinerja.					

E. BAGIAN KELIMA

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i tentang **partisipasi masyarakat** yang dilakukan lembaga eksekutif dalam menyusun arah dan kebijakan keuangan daerah (APBD).

No.	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD selalu melibatkan masyarakat.					
2.	Prioritas dan rencana APBD selalu					

	mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.					
3.	Dalam penyusunan APBD selalu melibatkan masyarakat.					
4.	Dalam advokasi APBD selalu melibatkan masyarakat.					
5.	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBD, selalu melibatkan masyarakat.					
6.	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD.					
7.	Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBD.					

F. BAGIAN KEENAM

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi Bapak/Ibu/Saudara/i terkait **transparansi kebijakan publik** yang dilakukan lembaga eksekutif terkait penyusunan pelaksanaan, hingga pelaporan evaluasi anggaran.

No.	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Selama ini pemerintah daerah selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusunnya.					
2.	Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan					

	anggaran yang disusun oleh pemerintah dapat dengan mudah diakses atau diperoleh masyarakat.					
3.	Selama ini pemerintah selalu tepat waktu dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban.					
4.	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasi dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang baik.					
5.	Saat ini pemerintah daerah telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggarannya.					

G. BAGIAN KETUJUH

PETUNJUK : Bagian ini meminta persepsi dan pengetahuan Bapak/Ibu/Saudara/i selaku dewan legislatif dalam menjalankan fungsi legislatifnya yaitu **mengawasi kinerja lembaga eksekutif dalam hal penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi keuangan daerah.**

No.	Pertanyaan	STS	TS	TT	S	SS
1.	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.					
2.	Anggota dewan selalu melakukan analisis politik terhadap proses penyusunan APBD.					
3.	Anggota dewan selalu dilibatkan dalam pengesahan APBD.					
4.	Anggota dewan memiliki					

	kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak pemerintah daerah.					
5.	Anggota dewan harus meyakinkan bahwa APBD telah memiliki transparansi.					
6.	Evaluasi yang dilakukan dewan mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBD.					
7.	Anggota dewan selalu mengusut dan menindaklanjuti jika terjadi kejanggalan dalam LPJ APBD.					
8.	Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD, pengendalian dan pemeriksaan/audit terhadap APBD bersifat keuangan.					

Lampiran 2
Rekap Hasil Kuesioner

Responden	X₁	X₂	X₃	X₄	X₅	Y
1.	28	30	29	33	22	33
2.	26	30	28	33	21	33
3.	26	28	28	33	21	33
4.	30	26	30	32	22	37
5.	28	27	31	31	23	38
6.	27	26	33	29	23	38
7.	27	26	30	32	23	36
8.	30	28	31	31	22	35
9.	27	28	32	30	22	35
10.	28	29	31	32	23	37
11.	27	28	30	32	20	37
12.	29	29	31	31	21	38
13.	29	26	31	32	22	35
14.	29	26	29	30	22	38
15.	25	28	30	33	21	38
16.	26	28	30	33	22	38
17.	28	25	29	33	21	37
18.	29	29	30	31	24	37
19.	33	28	33	32	24	38
20.	31	28	31	33	22	38
21.	26	29	28	33	21	33
22.	16	25	35	34	11	33
23.	21	20	30	25	16	28
24.	23	25	30	29	17	28
25.	24	25	31	33	20	34
26.	29	25	31	32	23	35

27.	29	27	30	33	21	38
28.	28	26	32	33	21	38
29.	28	28	30	31	22	39
30.	28	26	29	32	22	37
31.	27	28	30	31	21	36
32.	29	26	30	31	21	37
33.	27	25	29	29	22	38
34.	28	27	30	32	22	37
35.	28	25	30	33	21	36
36.	28	26	29	33	21	36
37.	28	30	29	30	21	37
38.	29	26	31	32	20	37
39.	24	25	29	25	20	30
40.	27	27	32	31	23	37

Lampiran 3**Staistik Deskriptif Rata-Rata Jawaban Kuesioner****Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran (X₁)****Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan_1(PDTA)	40	2	5	4.18	.781
Pertanyaan_2(PDTA)	40	1	5	4.18	.958
Pertanyaan_3(PDTA)	40	1	5	2.20	.758
Pertanyaan_4(PDTA)	40	1	5	3.78	.733
Pertanyaan_5(PDTA)	40	1	4	3.82	.675
Pertanyaan_6(PDTA)	40	4	5	4.37	.490
Pertanyaan_7(PDTA)	40	4	5	4.72	.452
TOTAL	40	16	33	27.25	2.817
Valid N (listwise)	40				

Komitmen Organisasi (X₂)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan_1(KO)	40	2	5	4.32	.616
Pertanyaan_2(KO)	40	4	5	4.40	.496
Pertanyaan_3(KO)	40	2	5	4.52	.640
Pertanyaan_4(KO)	40	4	5	4.45	.504
Pertanyaan_5(KO)	40	2	5	4.65	.622
Pertanyaan_6(KO)	40	4	5	4.50	.506
TOTAL	40	20	30	26.85	1.916
Valid N (listwise)	40				

Akuntabilitas Publik (X₃)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan_1(AP)	40	4	5	4.18	.385
Pertanyaan_2(AP)	40	4	5	4.30	.464
Pertanyaan_3(AP)	40	4	5	4.38	.490
Pertanyaan_4(AP)	40	4	5	4.52	.506
Pertanyaan_5(AP)	40	4	5	4.30	.464
Pertanyaan_6(AP)	40	4	5	4.32	.474
Pertanyaan_7(AP)	40	4	5	4.30	.464
TOTAL	40	28	35	30.30	1.436
Valid N (listwise)	40				

Partisipasi Masyarakat (X₄)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan_1(PM)	40	2	5	4.60	.632
Pertanyaan_2(PM)	40	4	5	4.42	.501
Pertanyaan_3(PM)	40	4	5	4.65	.483
Pertanyaan_4(PM)	40	3	5	4.40	.545
Pertanyaan_5(PM)	40	3	5	4.35	.580
Pertanyaan_6(PM)	40	4	5	4.48	.506
Pertanyaan_7(PM)	40	3	5	4.55	.552
TOTAL	40	25	34	31.45	1.961
Valid N (listwise)	40				

Transparansi Kebijakan Publik**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan_1(TKP)	40	2	5	4.43	.636
Pertanyaan_2(TKP)	40	2	5	4.13	.648
Pertanyaan_3(TKP)	40	2	5	4.18	.594
Pertanyaan_4(TKP)	40	2	5	4.22	.698
Pertanyaan_5(TKP)	40	2	5	4.22	.698
TOTAL	40	11	24	21.17	2.252
Valid N (listwise)	40				

Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Y)**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pertanyaan_1(PDPKD)	40	4	5	4.73	.452
Pertanyaan_2(PDPKD)	40	2	5	4.65	.622
Pertanyaan_3(PDPKD)	40	4	5	4.75	.439
Pertanyaan_4(PDPKD)	40	2	5	4.27	.599
Pertanyaan_5(PDPKD)	40	4	5	4.48	.506
Pertanyaan_6(PDPKD)	40	3	5	4.35	.533
Pertanyaan_7(PDPKD)	40	2	5	4.30	.648
Pertanyaan_8(PDPKD)	40	2	5	4.30	.648
TOTAL	40	28	39	35.82	2.678
Valid N (listwise)	40				

Lampiran 4

DISTRIBUSI NILAI r_{tabel} SIGNIFIKANSI 5% dan 1%

N	The Level of Significance		N	The Level of Significance	
	5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	38	0.320	0.413
4	0.950	0.990	39	0.316	0.408
5	0.878	0.959	40	0.312	0.403
6	0.811	0.917	41	0.308	0.398
7	0.754	0.874	42	0.304	0.393
8	0.707	0.834	43	0.301	0.389
9	0.666	0.798	44	0.297	0.384
10	0.632	0.765	45	0.294	0.380
11	0.602	0.735	46	0.291	0.376
12	0.576	0.708	47	0.288	0.372
13	0.553	0.684	48	0.284	0.368
14	0.532	0.661	49	0.281	0.364
15	0.514	0.641	50	0.279	0.361
16	0.497	0.623	55	0.266	0.345
17	0.482	0.606	60	0.254	0.330
18	0.468	0.590	65	0.244	0.317
19	0.456	0.575	70	0.235	0.306
20	0.444	0.561	75	0.227	0.296
21	0.433	0.549	80	0.220	0.286
22	0.432	0.537	85	0.213	0.278
23	0.413	0.526	90	0.207	0.267
24	0.404	0.515	95	0.202	0.263
25	0.396	0.505	100	0.195	0.256
26	0.388	0.496	125	0.176	0.230
27	0.381	0.487	150	0.159	0.210
28	0.374	0.478	175	0.148	0.194
29	0.367	0.470	200	0.138	0.181
30	0.361	0.463	300	0.113	0.148
31	0.355	0.456	400	0.098	0.128
32	0.349	0.449	500	0.088	0.115
33	0.344	0.442	600	0.080	0.105
34	0.339	0.436	700	0.074	0.097
35	0.334	0.430	800	0.070	0.091
36	0.329	0.424	900	0.065	0.086
37	0.325	0.418	1000	0.062	0.081

Lampiran 5

Hasil Uji Validitas Variabel X₁ (Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran)

Correlations

		Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	Pertanyaan_6	Pertanyaan_7	TOTAL
Pertanyaan_1	Pearson Correlation	1	.609**	.069	.250	.206	.159	-.005	.644**
	Sig. (2-tailed)		.000	.671	.120	.203	.327	.973	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_2	Pearson Correlation	.609**	1	-.191	.131	.128	.130	-.064	.535**
	Sig. (2-tailed)	.000		.238	.422	.432	.425	.696	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_3	Pearson Correlation	.069	-.191	1	.498**	.371*	.138	.239	.504**
	Sig. (2-tailed)	.671	.238		.001	.018	.396	.137	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_4	Pearson Correlation	.250	.131	.498**	1	.902**	.098	.350*	.797**
	Sig. (2-tailed)	.120	.422	.001		.000	.547	.027	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_5	Pearson Correlation	.206	.128	.371*	.902**	1	-.029	.426**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.203	.432	.018	.000		.859	.006	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_6	Pearson Correlation	.159	.130	.138	.098	-.029	1	.014	.320*
	Sig. (2-tailed)	.327	.425	.396	.547	.859		.929	.044
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_7	Pearson Correlation	-.005	-.064	.239	.350*	.426**	.014	1	.398*
	Sig. (2-tailed)	.973	.696	.137	.027	.006	.929		.011
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.644**	.535**	.504**	.797**	.738**	.320*	.398*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.001	.000	.000	.044	.011	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 6

Hasil Uji Validitas Variabel X₂ (Komitmen Organisasi)

Correlations

		Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	Pertanyaan_6	TOTAL
Pertanyaan_1	Pearson Correlation	1	.319*	.207	.178	.505**	.288	.760**
	Sig. (2-tailed)		.045	.201	.272	.001	.072	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_2	Pearson Correlation	.319*	1	.129	.185	.133	.000	.496**
	Sig. (2-tailed)	.045		.427	.254	.414	1.000	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_3	Pearson Correlation	.207	.129	1	.203	.087	-.040	.505**
	Sig. (2-tailed)	.201	.427		.210	.594	.809	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_4	Pearson Correlation	.178	.185	.203	1	.025	.201	.497**
	Sig. (2-tailed)	.272	.254	.210		.881	.214	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_5	Pearson Correlation	.505**	.133	.087	.025	1	.244	.622**
	Sig. (2-tailed)	.001	.414	.594	.881		.129	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_6	Pearson Correlation	.288	.000	-.040	.201	.244	1	.476**
	Sig. (2-tailed)	.072	1.000	.809	.214	.129		.002
	N	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.760**	.496**	.505**	.497**	.622**	.476**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.001	.000	.002	
	N	40	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 7

Hasil Uji Validitas Variabel X₃ (Akuntabilitas Publik)

Correlations

		Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	Pertanyaan_6	Pertanyaan_7	TOTAL
Pertanyaan_1	Pearson Correlation	1	.129	.187	-.089	.129	-.039	-.158	.320'
	Sig. (2-tailed)		.427	.248	.585	.427	.813	.330	.044
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_2	Pearson Correlation	.129	1	.056	-.033	.048	-.105	.286	.439''
	Sig. (2-tailed)	.427		.730	.841	.770	.520	.074	.005
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_3	Pearson Correlation	.187	.056	1	.427''	-.056	.014	.169	.601''
	Sig. (2-tailed)	.248	.730		.006	.730	.933	.297	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_4	Pearson Correlation	-.089	-.033	.427''	1	-.142	.126	-.033	.448''
	Sig. (2-tailed)	.585	.841	.006		.382	.440	.841	.004
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_5	Pearson Correlation	.129	.048	-.056	-.142	1	.361'	.048	.439''
	Sig. (2-tailed)	.427	.770	.730	.382		.022	.770	.005
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_6	Pearson Correlation	-.039	-.105	.014	.126	.361'	1	-.105	.418''
	Sig. (2-tailed)	.813	.520	.933	.440	.022		.520	.007
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_7	Pearson Correlation	-.158	.286	.169	-.033	.048	-.105	1	.400'
	Sig. (2-tailed)	.330	.074	.297	.841	.770	.520		.011
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.320'	.439''	.601''	.448''	.439''	.418''	.400'	1
	Sig. (2-tailed)	.044	.005	.000	.004	.005	.007	.011	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 8

Hasil Uji Validitas Variabel X₄ (Partisipasi Masyarakat)

Correlations

		Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	Pertanyaan_6	Pertanyaan_7	TOTAL
Pertanyaan_1	Pearson Correlation	1	.065	.118	.327*	.322*	.128	.206	.645**
	Sig. (2-tailed)		.691	.470	.039	.043	.430	.203	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_2	Pearson Correlation	.065	1	.313*	-.169	.004	.195	.338*	.453**
	Sig. (2-tailed)	.691		.049	.297	.978	.228	.033	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_3	Pearson Correlation	.118	.313*	1	.058	-.009	.068	.163	.441**
	Sig. (2-tailed)	.470	.049		.720	.955	.676	.314	.004
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_4	Pearson Correlation	.327*	-.169	.058	1	.114	.037	.102	.427**
	Sig. (2-tailed)	.039	.297	.720		.485	.820	.531	.006
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_5	Pearson Correlation	.322*	.004	-.009	.114	1	-.144	.424**	.512**
	Sig. (2-tailed)	.043	.978	.955	.485		.374	.006	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_6	Pearson Correlation	.128	.195	.068	.037	-.144	1	.234	.400*
	Sig. (2-tailed)	.430	.228	.676	.820	.374		.146	.011
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_7	Pearson Correlation	.206	.338*	.163	.102	.424**	.234	1	.689**
	Sig. (2-tailed)	.203	.033	.314	.531	.006	.146		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.645**	.453**	.441**	.427**	.512**	.400*	.689**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.004	.006	.001	.011	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 9

Hasil Uji Validitas Variabel X₅ (Transparansi Kebijakan Publik)

Correlations

		Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	TOTAL
Pertanyaan_1	Pearson Correlation	1	.366*	.273	.357*	.473**	.717**
	Sig. (2-tailed)		.020	.088	.024	.002	.000
	N	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_2	Pearson Correlation	.366*	1	.141	.560**	.220	.670**
	Sig. (2-tailed)	.020		.384	.000	.173	.000
	N	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_3	Pearson Correlation	.273	.141	1	.150	.397*	.551**
	Sig. (2-tailed)	.088	.384		.356	.011	.000
	N	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_4	Pearson Correlation	.357*	.560**	.150	1	.420**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.024	.000	.356		.007	.000
	N	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_5	Pearson Correlation	.473**	.220	.397*	.420**	1	.742**
	Sig. (2-tailed)	.002	.173	.011	.007		.000
	N	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.717**	.670**	.551**	.742**	.742**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 10

Hasil Uji Validitas Variabel Y (Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD))

Correlations

		Pertanyaan_1	Pertanyaan_2	Pertanyaan_3	Pertanyaan_4	Pertanyaan_5	Pertanyaan_6	Pertanyaan_7	Pertanyaan_8	TOTAL
Pertanyaan_1	Pearson Correlation	1	.652**	.808**	.097	.249	.197	-.149	.201	.573**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.551	.121	.224	.360	.213	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_2	Pearson Correlation	.652**	1	.705**	.196	.460**	.456**	.140	.521**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.225	.003	.003	.390	.001	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_3	Pearson Correlation	.808**	.705**	1	.269	.318*	.384*	.000	.361*	.748**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.094	.046	.015	1.000	.022	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_4	Pearson Correlation	.097	.196	.269	1	.404**	.092	.310	.046	.511**
	Sig. (2-tailed)	.551	.225	.094		.010	.571	.051	.777	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_5	Pearson Correlation	.249	.460**	.318*	.404**	1	.223	.180	.258	.631**
	Sig. (2-tailed)	.121	.003	.046	.010		.166	.267	.108	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_6	Pearson Correlation	.197	.456**	.384*	.092	.223	1	.208	.133	.546**
	Sig. (2-tailed)	.224	.003	.015	.571	.166		.199	.412	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_7	Pearson Correlation	-.149	.140	.000	.310	.180	.208	1	.146	.430**
	Sig. (2-tailed)	.360	.390	1.000	.051	.267	.199		.368	.006
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Pertanyaan_8	Pearson Correlation	.201	.521**	.361*	.046	.258	.133	.146	1	.577**
	Sig. (2-tailed)	.213	.001	.022	.777	.108	.412	.368		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
TOTAL	Pearson Correlation	.573**	.839**	.748**	.511**	.631**	.546**	.430**	.577**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.006	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X₁ (Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.646	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan_1	4.18	.781	40
Pertanyaan_2	4.18	.958	40
Pertanyaan_3	2.20	.758	40
Pertanyaan_4	3.78	.733	40
Pertanyaan_5	3.82	.675	40
Pertanyaan_6	4.38	.490	40
Pertanyaan_7	4.72	.452	40

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
27.25	7.936	2.817	7

Lampiran 12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X₂ (Komitmen Organisasi)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.608	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan_1	4.32	.616	40
Pertanyaan_2	4.40	.496	40
Pertanyaan_3	4.52	.640	40
Pertanyaan_4	4.45	.504	40
Pertanyaan_5	4.65	.622	40
Pertanyaan_6	4.50	.506	40

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
26.85	3.669	1.916	6

Lampiran 13

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X₃ (Akuntabilitas Publik)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.609	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan_1	4.18	.385	40
Pertanyaan_2	4.30	.464	40
Pertanyaan_3	4.38	.490	40
Pertanyaan_4	4.52	.506	40
Pertanyaan_5	4.30	.464	40
Pertanyaan_6	4.32	.474	40
Pertanyaan_7	4.30	.464	40

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
30.30	2.062	1.436	7

Lampiran 14

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X₄ (Partisipasi Masyarakat)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.616	7

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan_1	4.60	.632	40
Pertanyaan_2	4.42	.501	40
Pertanyaan_3	4.65	.483	40
Pertanyaan_4	4.40	.545	40
Pertanyaan_5	4.35	.580	40
Pertanyaan_6	4.48	.506	40
Pertanyaan_7	4.55	.552	40

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
31.45	3.844	1.961	7

Lampiran 15

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X₅ (Transparansi Kebijakan Publik)

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.720	5

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan_1	4.42	.636	40
Pertanyaan_2	4.12	.648	40
Pertanyaan_3	4.18	.594	40
Pertanyaan_4	4.22	.698	40
Pertanyaan_5	4.22	.698	40

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
21.18	5.071	2.252	5

Lampiran 16

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y (Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD))

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	40	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	40	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Cronbach's Alpha	N of Items
.741	8

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pertanyaan_1	4.72	.452	40
Pertanyaan_2	4.65	.622	40
Pertanyaan_3	4.75	.439	40
Pertanyaan_4	4.28	.599	40
Pertanyaan_5	4.48	.506	40
Pertanyaan_6	4.35	.533	40
Pertanyaan_7	4.30	.648	40
Pertanyaan_8	4.30	.648	40

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
35.82	7.174	2.678	8

Lampiran 17
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.76535603
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.074
	Negative	-.097
Kolmogorov-Smirnov Z		.611
Asymp. Sig. (2-tailed)		.849

a. Test distribution is Normal.

Lampiran 18
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27.049	5.220		5.181	.000		
X1	.307	.547	.986	1.714	.036	.242	3.733
X1_X2	.210	.008	.029	2.100	.021	.164	6.108
X1_X3	.005	.009	.510	1.647	.109	.145	6.884
X1_X4	.026	.007	.597	2.002	.049	.157	6.383
X1_X5	.015	.012	.599	1.347	.187	.171	4.170

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 19

Hasil Uji Glejser Heterokedastisitas

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
abs_res	1.5262728	1.00575658	40
X1	27.25	2.817	40
X1_X2	733.78	102.648	40
X1_X3	825.13	93.195	40
X1_X4	858.10	109.874	40
X1_X5	582.20	101.799	40

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.374 ^a	.140	.014	.99889814	1.956

a. Predictors: (Constant), X1_X5, X1_X4, X1_X3, X1_X2, X1

b. Dependent Variable: abs_res

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.525	5	1.105	1.107	.375 ^a
	Residual	33.925	34	.998		
	Total	39.450	39			

a. Predictors: (Constant), X1_X5, X1_X4, X1_X3, X1_X2, X1

b. Dependent Variable: abs_res

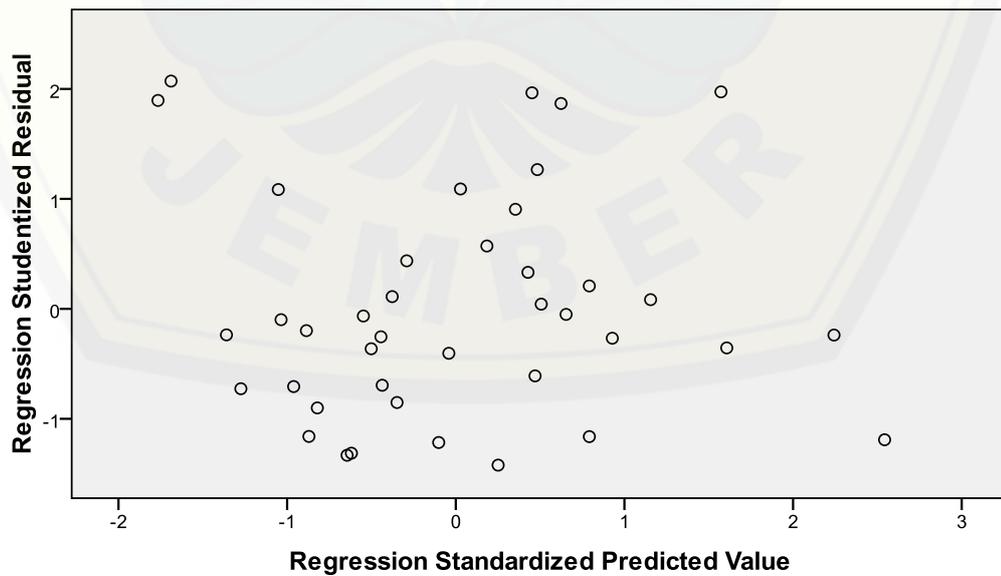
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.938	2.640		.734	.468		
X1	.212	.277	.594	.767	.449	.042	23.733
X1_X2	.005	.004	.537	1.366	.181	.164	6.108
X1_X3	-.003	.005	-.297	-.712	.481	.145	6.884
X1_X4	-.006	.004	-.647	-1.610	.117	.157	6.383
X1_X5	-.004	.006	-.405	-.676	.504	.071	14.170

a. Dependent Variable: abs_res

Scatterplot

Dependent Variable: abs_res



Lampiran 20**Hasil Analisis Regresi Linear Berganda****Regression****Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Y	35.83	2.678	40
X1	27.25	2.817	40
X1_X2	733.78	102.648	40
X1_X3	825.13	93.195	40
X1_X4	858.10	109.874	40
X1_X5	582.20	101.799	40

Correlations

		Y	X1	X1_X2	X1_X3	X1_X4	X1_X5
Pearson Correlation	Y	1.000	.228	.160	.366	.171	.051
	X1	.228	1.000	.097	.022	.008	.361
	X1_X2	.160	.097	1.000	.107	.270	.288
	X1_X3	.366	.022	.107	1.000	.334	.197
	X1_X4	.171	.008	.270	.334	1.000	.065
	X1_X5	.051	.361	.288	.197	.065	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.134	.215	.005	.001	.021
	X1	.134	.	.000	.000	.000	.000
	X1_X2	.215	.000	.	.000	.017	.000
	X1_X3	.005	.000	.000	.	.000	.009
	X1_X4	.001	.000	.017	.000	.	.000
	X1_X5	.021	.000	.000	.009	.000	.
N	Y	40	40	40	40	40	40
	X1	40	40	40	40	40	40
	X1_X2	40	40	40	40	40	40
	X1_X3	40	40	40	40	40	40
	X1_X4	40	40	40	40	40	40
	X1_X5	40	40	40	40	40	40

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1_X5, X1_X4, X1_X3, X1_X2, X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions					
				(Constant)	X1	X1_X2	X1_X3	X1_X4	X1_X5
1	1	5.977	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.016	19.457	.15	.00	.01	.00	.00	.04
	3	.003	42.364	.00	.00	.39	.13	.12	.09
	4	.002	50.740	.08	.00	.32	.03	.64	.06
	5	.001	65.816	.19	.00	.27	.66	.08	.36
	6	.000	130.360	.58	.99	.01	.18	.17	.45

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	29.86	40.63	35.83	1.942	40
Std. Predicted Value	-3.073	2.476	.000	1.000	40
Standard Error of Predicted Value	.363	1.610	.730	.231	40
Adjusted Predicted Value	27.81	41.71	35.81	2.167	40
Residual	-3.913	3.511	.000	1.844	40
Std. Residual	-1.981	1.778	.000	.934	40
Stud. Residual	-2.176	1.923	.000	1.033	40
Deleted Residual	-4.719	5.191	.015	2.323	40
Stud. Deleted Residual	-2.310	2.007	-.004	1.055	40
Mahal. Distance	.340	24.940	4.875	4.352	40
Cook's Distance	.000	.765	.051	.125	40
Centered Leverage Value	.009	.639	.125	.112	40

a. Dependent Variable: Y

Lampiran 21**Hasil Uji F****ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147.144	5	29.429	7.544	.000 ^a
	Residual	132.631	34	3.901		
	Total	279.775	39			

a. Predictors: (Constant), X1_X5, X1_X4, X1_X3, X1_X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)**Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.725 ^a	.526	.456	1.975	1.270

a. Predictors: (Constant), X1_X5, X1_X4, X1_X3, X1_X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Hasil Uji t**Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27.049	5.220		5.181	.000		
X1	.307	.547	.986	1.714	.036	.242	3.733
X1_X2	.210	.008	.029	2.100	.021	.164	6.108
X1_X3	.005	.009	.510	1.647	.109	.145	6.884
X1_X4	.026	.007	.597	2.002	.049	.157	6.383
X1_X5	.015	.012	.599	1.347	.187	.171	4.170

a. Dependent Variable: Y

